

Analisis Penggunaan APBD di Pemda kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2022

Rike Dian Permata Sari¹, Fathul Hilal Perdanakusuma², Winny Lian Seventeen³

¹²³ Universitas Prof. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

¹ rike.dps@gmail.com

² fathul.hp@gmail.com

³ winny.ls@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effectiveness ratio, efficiency ratio and growth ratio in the use of the Regency/City Regional Government APBD throughout Bengkulu Province. The results of this research show that the PAD Effectiveness Ratio for the 2018 to 2022 budget years respectively is 90.70%, 78.66%, 70.51%, 98.73% and 101.48%. Meanwhile, the efficiency ratio for using District/City APBDs in Bengkulu Province from 2018 to 2022 is 110.25%, 127.12%, 141.82%, 101.82% and 97.37%, finally the growth ratio for each calculation of APBD use Districts/cities throughout Bengkulu Province are also fluctuating or fluctuating. In 2018-2019 it was 10.18%, in 2019-2020 it was 1.27%, and experienced a drastic decrease in 2020-2021 amounting to -16.83 and in 2021-2022 it increased again although not too big, namely only 0.48 %.

Keywords: Policy; Voter Education;

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan penggunaan APBD PEMDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 secara berturut-turut adalah sebesar 90,70%, 78,66%, 70,51%, 98,73% dan 101,48%. Sedangkan rasio Efisiensi penggunaan APBD Kab/Kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sampai 2022 adalah 110,25%, 127,12%, 141,82%, 101,82% dan 97,37%, terakhir Rasio pertumbuhan dari setiap perhitungan penggunaan APBD Kab/Kota se Provinsi Bengkulu juga fluktuatif atau naik turun. Tahun 2018-2019 sebesar 10,18 %, tahun 2019-2020 sebesar 1,27%, dan mengalami penurunan drastis di tahun 2020-2021 sebesar -16,83 dan tahun 2021-2022 meningkat lagi meski tidak terlalu besar yaitu hanya 0,48%.

Kata Kunci: Kebijakan; Pendidikan Pemilih;

Cite this article format:

Sari, R.D.P., Perdanakusuma, F.H., Seventeen, W.L. (2024). Analisis Penggunaan APBD di Pemda kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2022. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(1).

PENDAHULUAN

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagaimana Yuliastati K (2017:161) menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dengan pendakatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai. APBD

biasa mencakup konteks ekonomi daerah, permasalahan keuangan daerah, atau perubahan kebijakan terkait. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, ketidak seimbangan anggaran, atau dampak kebijakan dapat menjadi titik awal analisis. Rahmawati (2023:795) mendefinisikan APBD dapat didefinisikan sebagai perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu, APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.

Yuliastati (2017:161-162) juga menyebutkan APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karna itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Elizar Sinambela, dkk (2018:95) menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintahan daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tututan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu.

Sejalan dengan teori Ayu, Ni Komang (2019:59-60) bahwa APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti undang-undang No.22 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah telah memberikan pemerintah daerah peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dana maupun kekayaan lainnya. Pengelolaan keuangan suatu daerah sangat mempengaruhi masa depannya karena dapat menjadikan daerah tersebut kuat atau lemah, tergantung bagaimana mengelola dananya. Oleh karna itu, ketika mengejar pembangunan nasional, sangat penting untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan anggaran untuk setiap waktu. sumber daya dan pendapatan potensial suatu daerah dikumpulkan untuk membuat anggarannya.

Anggaran kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan alokasi biaya (belanja) atau imput yang ditetapkan. Dalam anggaran kinerja, anggaran harus menunjukan tujuan suatu pengeluaran, biaya dari 'program' yang diusulkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan ukuran serta hasil dari setiap program tersebut. Jadi yang di maksud dengan Anggaran pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran keseluruhan pendapatan dan belanja yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini juga mencakup alokasi dana untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya, serta proyeksi pendapatan yang diharapkan dari sumber-sumber tertentu.

Rasio efektifitas dan rasio efesiensi merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, sedangkan rasio efesiensi merupakan rasio perbandingan kerja yang berguna diperoleh dari hasil operasi perusahaan tersebut dalam mengelola asset-aset yang dimilikinya. Halim dalam jurnal (Widyastuti, D., & Ayu, 2019:2) menyatakan bahwa Rasio Efektifitas merupakan rasio yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendapatan yang akan dicapai, yang selanjutnya akan disesuaikan dan dibandingkan dengan aturan target yang telah ditetapkan yang dilihat dari potensi riil daerah yang bersangkutan. Apabila tingkat keefektivitasan suatu daerah semakin meningkat maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah tersebut semakin baik. Kasmir dalam jurnal (Elan Kurniawan., 2019:30) mendefinisikan rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor industri.

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila di tambah dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal penjelasannya, Dr. Rohidin Mersyah, MMA selaku Gubernur Bengkulu mengatakan bahwa, Rancangan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Bengkulu 2023 yang disampaikan ini merupakan penjabaran dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tahun 2023, yang merupakan upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Bengkulu dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026 yaitu, Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat. Dilanjutkannya bahwa, RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan) Provinsi Bengkulu TA 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Bengkulu 2023 perlu dilakukan perubahan mengingat capaian kinerja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 menunjukan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Bengkulu tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian mengangkat judul Analisis Penggunaan APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Pemda Kabupaten Kota se-provinsi Bengkulu berdasarkan Rasio Efektifitas, Rasio Efesiensi, Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2022. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan tersebut, agar dapat diketahui sejauh mana kinerja keuangan Pemda dalam memanfaatkan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu, mengetahui pertumbuhan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari tahun ke tahun apakah terjadi peningkatan atau penurunan, serta penyebab yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013:7) yaitu metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Berikut data rasio efektivitas PAD pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu:

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pemda Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas (%)	Ket
1	Bengkulu Selatan	2018	67,24	58,72	114,52	Sangat Efektif
		2019	80,22	55,80	143,76	Sangat Efektif
		2020	86,15	80,34	107,22	Sangat Efektif
		2021	72,50	57,57	125,92	Sangat Efektif
		2022	52,29	51,86	100,82	Sangat Efektif
2	Bengkulu Tengah	2018	23,50	24,00	97,92	Efektif
		2019	23,04	20,66	111,52	Sangat Efektif

		2020	23,34	25,70	90,83	Efektif
		2021	23,93	23,44	99,71	Efektif
		2022	23,93	25,59	93,51	Efektif
3	Bengkulu Utara	2018	117,69	109,37	107,61	Sangat Efektif
		2019	71,75	83,03	86,42	Cukup Efektif
		2020	79,52	89,72	88,63	Cukup Efektif
		2021	102,46	87,11	117,63	Sangat Efektif
		2022	73,48	81,88	89,74	Cukup Efektif
4	Kaur	2018	37,09	41,61	89,12	Cukup Efektif
		2019	56,46	41,57	135,80	Sangat Efektif
		2020	53,86	74,33	72,47	Kurang Efektif
		2021	43,83	31,74	138,08	Sangat Efektif
		2022	32,40	30,22	107,21	Sangat Efektif
5	Kepahiang	2018	34,44	54,75	6,30	Tidak Efektif
		2019	36,28	39,64	91,52	Efektif
		2020	37,34	44,84	83,27	Cukup Efektif
		2021	34,60	39,93	86,65	Cukup Efektif
		2022	32,45	38,88	83,46	Cukup Efektif
6	Lebong	2018	35,31	42,96	82,19	Cukup Efektif
		2019	26,22	49,47	53,00	Tidak Efektif
		2020	19,43	47,70	40,73	Kurang Efektif
		2021	16,96	21,27	79,72	Kurang Efektif
		2022	16,83	21,60	77,92	Kurang Efektif
7	Mukomuko	2018	85,75	95,41	89,99	Cukup Efektif
		2019	80,76	104,29	77,44	Kurang Efektif
		2020	85,41	126,21	67,67	Kurang Efektif
		2021	55,44	68,36	81,11	Cukup Efektif
		2022	53,95	65,94	81,82	Cukup Efektif

8	Rejang Lebong	2018	84,51	93,36	90,52	Efektif
		2019	76,39	99,00	77,16	Kurang Efektif
		2020	69,19	91,72	75,44	Kurang Efektif
		2021	69,79	89,88	77,64	Kurang Efektif
		2022	74,00	76,70	96,48	Efektif
9	Seluma	2018	58,03	66,03	87,89	Cukup Efektif
		2019	67,23	58,63	114,68	Sangat Efektif
		2020	65,16	61,90	105,27	Sangat Efektif
		2021	36,19	58,98	61,39	Kurang Efektif
		2022	31,46	45,88	68,59	Kurang Efektif
10	Bengkulu	2018	182,88	182,64	100,13	Sangat Efektif
		2019	182,80	201,96	90,51	Efektif
		2020	155,15	207,59	74,74	Kurang Efektif
		2021	175,33	238,50	83,99	Cukup Efektif
		2022	74,00	76,70	79,18	Kurang Efektif

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Melihat perhitungan rasio efektivitas pada tiap tahun, pertama di Kabupaten Bengkulu Selatan kategori sangat efektif dan tiap tahunnya tingkat efektivitas berada pada posisi di atas 100% atau sama dengan 1 (satu). Di tahun pandemi yaitu 2020 dan 2021 pun tidak menjadi hambatan bagi Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menggunakan efektivitas PAD. Besarnya persentase tahun dari tahun ke tahun dengan jumlah target dan realisasi yang tidak berbeda setiap tahunnya menggambarkan bahwa upaya dan usaha pemerintah dalam pencapaian realisasi sangat mempengaruhi tingkat efektivitas PAD. Upaya dan usaha yang besar pemerintah dengan menekan pengeluaran dalam hal biaya pemerolehnya menjadi faktor penting dalam mengukur efektifitas penggunaan APBD di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan perhitungan yang telah dihasilkan.

Selanjutnya, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu Tengah secara persentasenya dapat dilihat bahwa efektivitas penggunaan APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah itu sudah efektif dan di tahun 2019 sudah sangat efektif penggunaannya. Sedikit berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, penggunaan APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan yang fluktuatif khususnya di masa pandemi tahun 2020. Di tahun 2020 mengalami selisih penurunan sebesar 20,69% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Meskipun begitu, rasio penggunaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara masih dalam kategori efektif. Rendahnya PAD yang diterima oleh Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan

karena tidak semua sumber-sumber PAD yang dapat ditagih oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun beberapa jenis PAD yang tidak berhasil dipungut oleh Kabupaten Bengkulu Tengah ialah pendapatan BLUD dan JKN, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan bunga deposito, pajak air tanah serta pajak sarang burung walet.

Rasio perhitungan efektivitas sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami naik turun persentase. Tahun 2018 efektivitas penggunaan APBD di pemda Kabupaten Bengkulu Utara sangat efektif dengan persentase 107,61%, dan mengalami penurunan ditahun 2019 di mana perhitungannya sebesar 86,42%, mengalami peningkatan sedikit di tahun 2020 dengan persentase sebesar 88,63% kemudian naik signifikan lagi menjadi 117,63% di tahun 2021, terakhir menjadi 89,74% di tahun 2022. Ke fluaktifan rasio efektivitas penggunaan APBD di Pemda Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan kinerja pemerintah nya. Di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan meskipun masih dalam kategori cukup efektif. Meskipun begitu, kinerja pemerintah dalam mewujudkan pendapatan daerahnya sendiri yang akan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi riil suatu daerah khususnya Kabupaten Bengkulu Utara.

Di Kabupaten Kaur, pendapatan daerah cukup memuaskan yaitu pada tahun 2019, tahun 2021 dan tahun 2022 yang termasuk dalam nilai kategori sangat efektif. Di Kabupaten Kaur, tahun 2020 terlihat jelas bahwa pandemi sangat mempengaruhi penggunaan APBD Pemda Kabupaten Kaur. Penurunan rasio perhitungan efektivitas penggunaan APBD Pemda Kaur pun bertaut sampai 63,33%. Angka ini cukup besar dalam penurunan efektivitas penggunaan APBD Pemda Kabupaten Kaur. Di tahun 2020 pula rasio efektivitas penggunaan APBD Pemda Kabupaten Kaur masuk ke dalam kategori kurang efektif.

Di banding Kabupaten/Kota di Pemda lain, rasio perhitungan efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Kepahiang termasuk rendah. Dari tahun 2018 – 2022 terhitung Pemda Kabupaten Kepahiang belum pernah menyentuh kategori sangat efektif seperti hal nya dengan kategori di Pemda Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mempertahankan APBD masih terbilang kurang.

Efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018 sudah efektif yaitu sebesar 90,52. Selanjutnya di tahun 2019 mengalami penurunan dan kurang efektif yaitu sebesar 77,16%. Dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan nilai efektivitasnya tidak efektif yaitu sebesar 75,44%, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 77,64% meskipun masih kurang efektif dan pada tahun 2022 kembali efektif di mana penilaiannya sebesar 96,48%. Untuk Kabupaten Rejang Lebong, efektivitas penggunaan APBD sudah menurun sejak tahun 2019, kemudia di tahun 2021 masih tetap menurun dan masuk di kategori tidak efektif. Efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Rejang Lebong mulai naik menjadi efektif sejak tahun 2022.

Berdasarkan data perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Seluma secara berturut-turut adalah

sebesar 87,89%, 114,68%, 105,27%, 61,39% dan 68,59%. Sesuai kriteria penilaian efektivitas penggunaan APBD di pemda Kabupaten Seluma ialah kurang efektif dan hanya di tahun 2021 dan 2022 yang kurang efektif. Hal menarik terjadi di Pemda Kabupaten Seluma, di mana efektivitas penggunaan APBD nya justru naik ketika di tahun 2020 di masa pandemi dan masuk ke kategori efektif. Namun sayangnya, pemerintah Kabupaten Seluma tidak dapat mempertahankan efektivitas tersebut dan ini dibuktikan dengan penurunan perhitungan rasio efektivitas penggunaan APBD di Kabupaten Seluma itu sendiri di mana pada tahun 2021 – 2022 rasio perhitungan penggunaan APBD Kabupaten Seluma menjadi kurang efektif dan selisih persentase nya terbilang lumayan.

Terakhir, efektivitas penggunaan APBD Kota Bengkulu pada tahun 2018 sangat efektif yaitu sebesar 100,13. Selanjutnya di tahun 2019 juga efektif yaitu sebesar 90,51% hanya saja ketika tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 74,74% angka ini masih dikategori kurang efektif. Ditahun berikutnya tahun 2021 kembali cukup efektif yaitu sebesar 83,99% dan mengalami penurunan kembali ditahun 2022 yaitu 79,18%. Kota Bengkulu merasakan hal yang sama perihal penurunan perhitungan efektivitas penggunaan APBD di mana di tahun 2020 menurun menjadi kurang efektif sama seperti beberapa Kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan APBD Pemda Kab/Kota se- Provinsi Bengkulu mengalami turun naik. Di tahun 2018 masuk kriteria Efektif, dua tahun setelahnya 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang masuk ke kriteria kurang efektif dan pada tahun 2021 kembali efektif dengan nilai 98,73 dan kembali meningkat di tahun 2022 yaitu mencapai 101,48% dengan kriteria sangat Efektif. Dari hasil perhitungan tersebut juga dapat disimpulkan bahwasannya pada masa pandemi efektivitas penggunaan APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang melanda seluruh dunia, sehingga salah satu yang menjadi dampaknya ialah efektivitas penggunaan APBD Pemda Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. Hal ini tentu sesuai dengan hasil perhitungan rasio efektivitas yang telah peneliti olah sebelumnya berdasarkan data yang sudah di reduksi oleh peneliti.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu untuk aspek rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan kedalam kriteria cukup efektif. Hal ini terjadi karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak mencapai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus terus mengoptimalkan penerimaan dari sumber lainnya sehingga diharapkan tidak terpaksa dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD sehingga dapat melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Hanya saja dalam rentan waktu 2018 – 2022 di tahun 2020 – 2021 efektivitas penggunaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu mengalami masa-masa sulit yang kurang efektif. Penyebab utamanya ialah pandemi Covid. Di mana selama pandemi melanda, sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan APBD yang ada, tidak hanya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten.Kota se-Provinsi Bengkulu namun juga dirasakan oleh pemerintah daerah di luar provinsi Bengkulu di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian masih rendahnya tingkat PAD yang diterima oleh masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu, salah satu penyebabnya adalah kecilnya jumlah PAD yang mampu dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Salah satu pajak yang sering menunggak adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu solusi yang di ambil oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi memaparkan terkait perbedaan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dikategorikan efisien bila rasio yang diperoleh di bawah 100%. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cermat dalam mengestimasi besaran biaya untuk mengaktualisasi pendapatan agar dapat dievaluasi apakah kegiatan pemungutan efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target akan kurang berarti jika biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi pendapatan lebih besar daripada pendapatan yang diterima sebenarnya. Perhitungan rasio efisiensi penggunaan APBD pemda Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Efisiensi Pemda Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi (%)	Ket
1	Bengkulu Selatan	2018	58,72	67,24	87,32	Kurang efisien
		2019	55,80	80,22	69,55	Kurang efisien
		2020	80,34	86,15	93,25	Efisien
		2021	57,57	72,50	79,40	Kurang Efisien
		2022	51,86	52,29	99,17	Efisien
2	Bengkulu Tengah	2018	24,00	23,50	102,12	Sangat efisien
		2019	20,66	23,04	89,67	Kurang Efisien
		2020	25,70	23,34	110,11	Sangat efisien
		2021	57,57	72,50	79,40	Kurang Efisien
		2022	51,86	52,29	99,17	Efisien
3	Bengkulu Utara	2018	109,37	117,69	92,93	Efisien
		2019	83,03	71,75	115,72	Sangat efisien
		2020	89,72	79,52	112,82	Sangat efisien

		2021	87,11	102,46	85,01	Cukup Efisien
		2022	81,88	73,48	111,43	Sangat efisien
4	Kaur	2018	41,61	37,09	112,18	Sangat efisien
		2019	41,57	56,46	73,62	Kuang Efisien
		2020	74,33	53,86	138,00	Sangat efisien
		2021	31,74	48,83	65,00	Kurang Efisien
		2022	30,22	32,40	93,27	Efisien
5	Kepahiang	2018	54,75	34,44	158,97	Sangat efisien
		2019	39,64	36,28	109,26	Sangat efisien
		2020	44,84	37,34	120,08	Sangat efisien
		2021	39,93	34,60	115,40	Sangat efisien
		2022	38,88	32,45	119,81	Sangat efisien
6	Lebong	2018	42,96	35,31	121,66	Sangat efisien
		2019	49,47	26,22	188,67	Sangat efisien
		2020	47,70	19,43	245,49	Sangat efisien
		2021	21,27	16,96	125,41	Sangat efisien
		2022	21,60	16,83	128,34	Sangat efisien
7	Mukomuko	2018	95,41	87,75	108,72	Sangat efisien
		2019	104,29	80,76	129,13	Sangat efisien
		2020	126,21	85,41	147,76	Sangat efisien
		2021	68,36	55,44	123,30	Sangat efisien
		2022	65,94	53,95	122,22	Sangat efisien
8	Rejang Lebong	2018	93,36	84,51	110,47	Sangat efisien
		2019	99,00	76,39	129,59	Sangat efisien
		2020	91,72	69,19	132,56	Sangat efisien
		2021	89,88	69,79	128,78	Sangat efisien
		2022	76,70	74,00	103,64	Sangat efisien

9	Seluma	2018	66,03	58,03	113,78	Sangat efisien
		2019	58,63	67,23	87,20	Cukup Efisien
		2020	61,90	65,16	94,99	Efisien
		2021	58,98	36,19	213,44	Sangat efisien
		2022	45,88	31,46	145,83	Sangat efisien
10	Bengkulu	2018	182,64	182,88	99,86	Efisien
		2019	201,96	182,80	110,48	Sangat efisien
		2020	207,59	155,15	133,79	Sangat efisien
		2021	238,50	175,33	136,02	Sangat efisien
		2022	76,70	74,00	103,64	Sangat efisien

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka perhitungan rasio efisiensi penggunaan APBD Se-Provinsi Bengkulu tahun 2018-2021 sebagian besar termasuk dalam kategori sangat efisien. Berbeda dengan hasil perhitungan rasio efektivitas penggunaan APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu, yang mana mengalami penurunan di tahun 2020, rasio efisiensi justru menjadi kebalikannya. Terhitung sejak tahun 2018 – 2021 rasio perhitungan efisiensi penggunaan APBD Pemda Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu sudah sangat efisien dan hanya di tahun 2022 saja sedikit menurun namun masih dalam kategori efisien. Hal ini berarti di tahun pandemi, efisiensi penggunaan APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu tidak terlalu berpengaruh terhadap perhitungannya. Ini membuktikan bahwa rasio perhitungan efisiensi pemda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu itu sesuai dengan tabel di atas ialah sebagian besar sudah sangat efisien dan menandakan bahwa pemerintah dalam menggunakan APBD sudah efisien meskipun dalam keadaan pandemi sekalipun. Hal ini menunjukkan kefluaktifan atau naik turunnya perhitungan tidak terlalu berarti bagi penggunaan APBD Kab/Kota Se Provinsi Bengkulu itu sendiri.

Pemda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu dalam mempertahankan efisiensi penggunaan APBD nya diharapkan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip value for money yang ekonomis, efektif, dan efisien. Butuh program yang konkret agar tingkat efisiensi dapat teratasi terutama dalam kinerja pemerintah daerah terhadap pendapatan maupun belanja daerah.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan penggunaan APBD Pemda Kab/Kota se Provinsi Bengkulu memberikan gambaran terkait kinerja pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang

positif menandakan bahwa realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Berikut adalah perhitungan rasio pertumbuhan APBD Pemda Kab/Kota se Provinsi Bengkulu dari tahun 2018-2022 :

Tabel 1. Rasio Pertumbuhan Pemda Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD	Rasio Pertumbuhan (%)	Ket
1	Bengkulu Selatan	2018-2019	67,24	19,30	Rendah
		2019-2020	80,22	7,39	Rendah
		2020-2021	86,15	-15,84	Rendah
		2021-2022	72,50	-27,87	Rendah
2	Bengkulu Tengah	2018-2019	23,50	-1,95	Rendah
		2019-2020	23,04	1,30	Rendah
		2020-2021	23,34	2,52	Rendah
		2021-2022	23,93	8,75	Rendah
3	Bengkulu Utara	2018-2019	117,69	-39,03	Rendah
		2019-2020	71,75	10,82	Rendah
		2020-2021	79,52	28,84	Rendah
		2021-2022	102,46	-28,28	Rendah
4	Kaur	2018-2019	37,09	52,22	Rendah
		2019-2020	56,46	-4,60	Rendah
		2020-2021	53,86	-18,62	Rendah
		2021-2022	43,83	-26,07	Rendah
5	Kepahiang	2018-2019	34,44	5,34	Rendah
		2019-2020	36,28	2,92	Rendah
		2020-2021	37,34	-7,33	Rendah
		2021-2022	34,60	-6,21	Rendah
6	Lebong	2018-2019	35,31	-25,74	Rendah
		2019-2020	26,22	-25,89	Rendah
		2020-2021	19,43	-12,71	Rendah
		2021-2022	16,96	-0,76	Rendah

7	Mukomuko	2018-2019	85,75	-5,81	Rendah
		2019-2020	80,76	5,75	Rendah
		2020-2021	85,41	5,76	Rendah
		2021-2022	55,44	-2,68	Rendah
8	Rejang Lebong	2018-2019	84,51	-9,60	Rendah
		2019-2020	76,39	-9,42	Rendah
		2020-2021	69,19	0,86	Rendah
		2021-2022	69,79	6,03	Rendah
9	Seluma	2018-2019	58,03	15,85	Rendah
		2019-2020	67,23	-3,07	Rendah
		2020-2021	65,16	-44,45	Rendah
		2021-2022	36,19	-13,06	Rendah
10	Bengkulu	2018-2019	182,88	-0,04	Rendah
		2019-2020	182,80	-15,12	Rendah
		2020-2021	155,15	13,00	Rendah
		2021-2022	175,33	-57,59	Rendah

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Realisasi penggunaan APBD Pemda Kab/Kota se Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif atau naik turun. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD yang naik turun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pertumbuhan PAD yang naik turun ini menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakstabilan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini terbukti dan sejalan dengan hasil perhitungan rasio pertumbuhan dari Pemda Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. Di mana pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan seperti yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penggunaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu masih terbilang rendah di mana angka yang dihasilkan masih terdapat minus dan persentase nya di bawah angka <60%. Hal ini justru menjadi PR tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan penggunaan APBD Pemda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu supaya ke depannya bisa meningkat lebi baik lagi sehingga tidak lagi menghasilkan minus dan di bawah persentase angka <60%.

Berdasarkan hasil penelitian masih rendahnya rasio pertumbuhan yang disebabkan karena nilai PAD yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Penyebab hal tersebut adalah karena masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat.

Hal ini dilihat dari masih tingginya dana transfer dari pusat untuk masing-masing daerah di kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dengan tingginya dana transfer dari pusat akan menurunkan kemandirian keuangan daerah karena kebutuhan daerah akan dibiayai oleh dana bantuan dari pusat. Ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat ini akan menimbulkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022 secara berturut-turut adalah sebesar 90,70%, 78,66%, 70,51%, 98,73% dan 101,48%. Sesuai Kriteria Penilaian Efektivitas penggunaan APBD Kab/Kota se Provinsi Bengkulu rasio efektivitasnya fluktuatif atau naik turun. Meski terdapat dua tahun yang kurang efektif yaitu tahun 2019 dan 2020, namun di tahun-tahun lain sudah efektif dan di tahun 2022 mencapai kategori sangat efektif.
- b. Rasio Efisiensi penggunaan APBD Kab/Kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sampai 2022 adalah 110,25%, 127,12%, 141,82%, 101,82% dan 97,37%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Efisiensi tentang Kriteria Penilaian Efisiensinya dapat disimpulkan bahwa pemda Kab/Kota se Provinsi Bengkulu itu sudah sangat efisien, meskipun mengalami penurunan di tahun 2022 namun tidak menjadi hal yang sangat berarti.
- c. Rasio pertumbuhan dari setiap perhitungan penggunaan APBD Kab/Kota se Provinsi Bengkulu juga fluktuatif atau naik turun. Tahun 2018-2019 sebesar 10,18 %, tahun 2019-2020 sebesar 1,27%, dan mengalami penurunan drastis di tahun 2020-2021 sebesar -16,83 dan tahun 2021-2022 meningkat lagi meski tidak terlalu besar yaitu hanya 0,48%.

REFERENSI

- Anjar Nora Vurry (2018) 'Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng', Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Bisma Jurn.
- Aris Rante (2017) 'Analisis Kemandirian Keuangan Daerah', Universitas Mulawarman. Samarinda .
- Ayu, Ni Komang, D. (2019) 'No Title', "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Vol. 26 No.
- Azizah, A.H. (2021) Analisis Perbedaan Tingkat Financial Distress Menggunakan Metode Zmijewski Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 Dan 2020). Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Bastian, I. (2014) Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Cetakan 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Biduri, Sarwenda. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan 1. Sidoarjo : UMSIDA Press.
- Dhea Ayu Anggela (2021) 'ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN PERIODE

- (2019-2020) (Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)', Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro. .
- Elan Kurniawan. (2019) 'No Title', Pengaruh Inflasi, Jakarta Islamic Index, Bagi Hasil Bank Syariah Terhadap Investasi Reksa Dana Syariah, no. 1 (201(Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2,).
- Ghozali (2017 (2017) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Lindawati, A.S.L. dan M.E.P. (2015) "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan", Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol. 6 No.
- Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia.
- Mahmudi (2019) No Title. Edisi 3 Ce. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- La Ode abdul Wahab (2017) 'Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura', Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No.
- Sugiyono (2013) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono (2016) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waruwu, M. (2023) 'Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. VII,.
- Widyastuti, D., & Ayu, A. (2019), Tingkat Ketergantungan Lansia Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin Di Panti Sosial Trsena Werda Nirwana Puri Samarinda, Borneo Nursing Journal (BNJ), 1(1) :1-15.
- Yuliastati, K. (2017) 'No Title', Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.(Jurnal Katalogis).